



fintech
indonesia

FINTECH UPDATE

EDISI JULI - SEPTEMBER 2026



MENATA ARSITEKTUR FINTECH DAN EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL MASA DEPAN BERBASIS TATA KELOLA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

IDBS 2026 TEGASKAN
FINTECH SEBAGAI MITRA
STRATEGIS PERBANKAN DAN
ENABLER SEKTOR RIIL

AFTECH STRATEGIC
DIALOGUE PERKUAT
AGENDA FINTECH UNTUK
SEKTOR RIIL

FEKDI X IFSE 2026
PERKUAT SINERGI INOVASI,
TALENDA, DAN
KEPERCAYAAN DIGITA

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

- 
- 2 Perubahan Susunan AFTECH 2025-2029
 - 3 Sambutan Ketua Umum AFTECH
 - 4 Kegiatan Advokasi Kebijakan
 - 28 Kegiatan Pengembangan Komunitas
 - 37 Kegiatan Pengurus
 - 38 Liputan Khusus:
IDBS 2026 Tegaskan Fintech sebagai Mitra Strategis Perbankan dan Enabler Sektor Riil
 - 42 Liputan Khusus:
FEKDI x IFSE 2026 Perkuat Sinergi Inovasi, Talenta, dan Kepercayaan Digital
 - 44 Liputan Khusus:
Back to the Drawing Board Series,
AFTECH Rumuskan Arah Industri Fintech Menuju 2032
 - 47 Artikel Revisi P2SK untuk Siapa?
Oleh Dupoin
 - 50 Bulan Fintech Nasional 2026
 - 51 The Indonesian Fintech Association
Membership

Pengurus AFTECH

Periode 2025-2029

Dewan Pengawas



Dewan Kehormatan/Etik



Dewan Pengurus Harian



SAMBUTAN KETUA UMUM

Asosiasi Fintech Indonesia

Industri fintech Indonesia sedang memasuki babak baru. Setelah tumbuh melalui inovasi, perluasan akses, dan adopsi teknologi, arah industri kini semakin dibentuk oleh perubahan kerangka regulasi. Regulasi tidak lagi hanya menjadi batas kepatuhan, tetapi menjadi fondasi yang menentukan ruang inovasi, kualitas tata kelola, dan tingkat kepercayaan publik.

Edisi Juli sampai September ini merekam bagaimana perubahan tersebut mulai terlihat secara konkret. Pembahasan mengenai UU P2SK, regulatory sandbox, ITSK, aset keuangan digital, perlindungan data pribadi, penyampai informasi sektor jasa keuangan, serta roadmap berbagai klaster menunjukkan bahwa masa depan fintech sedang disusun secara lebih terstruktur. Setiap model bisnis kini dituntut untuk tidak hanya tumbuh, tetapi juga memiliki arah, standar, dan akuntabilitas yang lebih jelas.



Bagi AFTECH, perubahan ini perlu dibaca sebagai kesempatan untuk naik kelas. Fintech tidak lagi berdiri sebagai alternatif layanan keuangan, tetapi menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Karena itu, industri harus mampu menjawab kebutuhan regulator, menjaga perlindungan konsumen, memperkuat keamanan dan tata kelola data, sekaligus terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, UMKM, dan sektor riil.

Arah ini juga tercermin dalam agenda strategis AFTECH, mulai dari Bulan Fintech Nasional, Digital x Real Sector Launchpad bersama Bappenas, AFTECH Datahub, hingga penyusunan AFTECH Industri Roadmap 5 tahun ke depan. Seluruh inisiatif tersebut menunjukkan bahwa masa depan fintech tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh ekosistem, data, kolaborasi, dan kemampuan industri menerjemahkan inovasi menjadi produktivitas nasional.

Ke depan, regulasi yang baik perlu menjaga keseimbangan antara kepastian bagi pelaku usaha, perlindungan bagi konsumen, dan ruang bagi inovasi. Tanpa kepastian, investasi akan tertahan. Tanpa perlindungan, kepercayaan akan melemah. Tanpa inovasi, kontribusi fintech terhadap sektor riil tidak akan berkembang optimal.

Melalui edisi ini, saya mengajak seluruh anggota AFTECH untuk melihat perubahan regulasi sebagai momentum memperkuat industri. AFTECH akan terus menjadi mitra pelaku usaha regulator dan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inovatif, terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan.

Pandu Sjahrir

Ketua Umum AFTECH

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dorong Pengembangan Tokenisasi RWA untuk Memperluas Akses Pembiayaan Sektor Riil



Tokenisasi Real World Asset (RWA) membuka peluang baru dalam pengembangan sumber pembiayaan inovatif dengan menghubungkan aset nyata ke dalam ekosistem keuangan digital. Pemanfaatan teknologi ini berpotensi meningkatkan likuiditas aset, memperluas akses investasi dan pembiayaan, serta mendukung kebutuhan pendanaan sektor riil dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada 27 Juli 2026, AFTECH berpartisipasi dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas peluang, kesiapan, dan tantangan pengembangan tokenisasi RWA di Indonesia. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan tokenisasi aset sebagai alternatif pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya tokenisasi RWA sebagai sumber pembiayaan inovatif bagi sektor riil. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menggarisbawahi bahwa pengembangan RWA perlu diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, pelaku usaha, dan masyarakat di berbagai daerah, sehingga manfaat inovasi keuangan digital dapat dirasakan secara lebih merata.

AFTECH menegaskan bahwa pengembangan tokenisasi RWA membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif, tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui partisipasi dalam forum ini, AFTECH terus mendorong pengembangan ekosistem aset keuangan digital yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perluasan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas sektor riil, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dorong Penguatan Infrastruktur Digital dan Keamanan Siber untuk Membangun Ekosistem Digital yang Terpercaya



Pengembangan ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi infrastruktur yang kuat, keamanan yang memadai, serta tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Seiring meningkatnya pemanfaatan layanan digital, penguatan Digital Public Infrastructure (DPI), identitas digital, keamanan siber, dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Pada 28 Juli 2026, AFTECH menghadiri AmCham Indonesia & Mastercard Executive CTO Luncheon bertajuk “Building Indonesia’s Trusted Digital Future”. Forum ini mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, asosiasi, penyedia teknologi, dan pelaku industri untuk membahas tantangan serta peluang kolaborasi dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albanjar, menekankan bahwa pembangunan ekosistem digital yang terpercaya memerlukan kolaborasi lintas sektor. Penguatan infrastruktur digital publik, pengembangan identitas digital yang andal, peningkatan ketahanan keamanan siber, serta penerapan tatakelola AI menjadi aspek penting untuk memastikan inovasi teknologi dapat berkembang secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui partisipasi dalam forum ini, AFTECH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri dalam membangun fondasi ekonomi digital nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital Indonesia yang semakin inovatif, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bahas Kebijakan Perpajakan Industri Keuangan Digital bersama DJP



Pertumbuhan industri keuangan digital membutuhkan kebijakan perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis. Ketika transaksi semakin bernilai kecil, berulang, lintas platform, dan terhubung dengan aset digital, desain perpajakan perlu memastikan kepatuhan tetap terjaga tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha maupun konsumen.

AFTECH melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 4 Agustus 2026 untuk menyampaikan pandangan dan usulan industri atas kebijakan perpajakan yang berlaku. AFTECH diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar, Anggota Dewan Etik AFTECH, Krishna Chandra, Wakil Ketua Umum III AFTECH, Anggie Ariningsih, Mercy Simorangkir selaku Direktur Eksekutif, serta sejumlah perwakilan klaster terkait.

Dalam audiensi ini, AFTECH memperkenalkan mandat asosiasi yang per Desember 2025 menaungi 200 perusahaan anggota, terdiri dari 112 anggota tetap, 57 anggota pemantau, 27 anggota kehormatan, dan 4 anggota pendukung yang tersebar dalam 48 klaster model bisnis. Cakupan ini menunjukkan luasnya dampak kebijakan perpajakan terhadap ekosistem keuangan digital.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah bea meterai atas dokumen transaksi digital. AFTECH menyoroti beban Rp10.000 yang dikenakan secara seragam atas setiap perjanjian transaksi digital tanpa mempertimbangkan nilai transaksi. Dalam layanan seperti BNPL dan asuransi mikro, nilai transaksi dapat relatif kecil sehingga beban meterai berpotensi tidak proporsional.

AFTECH juga menyampaikan pandangan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, serta perpajakan aset kripto, aset keuangan digital, dan tokenisasi. Untuk PALN, AFTECH mengusulkan tarif final yang kompetitif dan penunjukan platform domestik sebagai pemungut agar kepatuhan dan traceability transaksi dapat diperkuat.

Audiensi ini menjadi kanal penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi teknis penyelenggara fintech dan otoritas fiskal. Tindak lanjut diarahkan pada penyampaian data pendukung, pemetaan model bisnis anggota, serta pembahasan teknis lanjutan mengenai PALN, klasifikasi token, dan penguatan kemitraan penyedia jasa aplikasi perpajakan.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dukung Seleksi 80 Proposal PIDI Digdaya dan Hackathon 2026

PUSAT INOVASI DIGITAL INDONESIA DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL



Pengembangan inovasi digital membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan talenta, industri, pembuat kebijakan, dan peluang implementasi. Kompetisi inovasi seperti PIDI Digdaya dan Hackathon 2026 menjadi penting karena tidak hanya menyeleksi ide, tetapi juga menguji kesiapan solusi untuk menjawab persoalan nyata di sektor keuangan, pangan, UMKM, layanan publik, dan ekonomi digital.

AFTECH berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Penyeleksian 80 Proposal PIDI Digdaya dan Hackathon 2026 pada 6 Agustus 2026. AFTECH diwakili oleh Zakka Farisy sebagai anggota Komite Asesor. Forum ini menyaring 480 proposal menjadi 80 proposal yang berhak melanjutkan ke tahap Capstone Project.

Shortlist akhir terdiri dari 40 proposal kategori profesional dan 40 proposal kategori mahasiswa. Komposisinya mencakup 30 proposal pada penguatan ketahanan dan inovasi keuangan, 30 proposal pada peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, serta 20 proposal pada percepatan layanan publik, ekonomi kreatif, dan ekspor jasa digital.

Pada tingkat sub-problem statement, dua tema paling dominan adalah manajemen risiko dengan 14 proposal dan digitalisasi ketahanan pangan dengan 12 proposal. Tema lainnya mencakup inklusi ekonomi UMKM, digitalisasi penciptaan lapangan kerja, perluasan investor ritel, dan digitalisasi keuangan syariah.

Dari perspektif AFTECH, konsentrasi tema tersebut menunjukkan keterkaitan kuat dengan model bisnis anggota, terutama pada credit scoring, fraud detection, risk analytics, dan layanan berbasis data. Hal ini membuka peluang bagi anggota untuk terlibat sebagai mentor, mitra strategis, maupun off-taker teknologi.

Kesenjangan spasial tetap menjadi catatan karena sebagian besar tim terpilih masih terkonsentrasi di Jawa. Dengan mayoritas inovasi berada pada tahap prototype atau proof of concept, tahap Capstone Project menjadi ruang penting untuk memperkuat kualitas solusi, kesiapan implementasi, dan koneksi dengan kebutuhan industri.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

Forum Anggota Bidang Sektor Pembayaran: AFTECH Fasilitasi Diskusi tentang Implementasi SPP TDLN



Implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri membutuhkan kesiapan teknis, operasional, dan tata kelola data dari berbagai pihak. Bagi pelaku pembayaran digital, isu ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pajak, tetapi juga dengan alur data, relasi dengan merchant, perlindungan data pribadi, dan risiko pemungutan ganda.

AFTECH menyelenggarakan forum diskusi antara anggota di sektor sistem pembayaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara mengenai kesiapan implementasi SPP-TDLN pada 12 Agustus 2026. Forum ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal AFTECH, Firle Ganinduto, dengan pemaparan dari Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata. Kegiatan ini diikuti lebih dari 50 perwakilan anggota dari bank, fintech, e-wallet, dan payment gateway.

AFTECH menegaskan dukungan terhadap SPP-TDLN sebagai langkah memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan antara penyedia jasa digital dalam dan luar negeri. Pendekatan serupa telah diterapkan di sejumlah yurisdiksi, termasuk Malaysia, Singapura, India, dan Estonia.

Dalam forum ini, AFTECH menyampaikan enam area masukan anggota. Masukan tersebut mencakup spesifikasi teknis pertukaran data, kejelasan subjek dan objek pemungutan, tata kelola dan perlindungan data, kepastian hukum dan operasional, komunikasi kepada merchant dan pengguna, serta tahapan implementasi bertahap.

Sesi tanya jawab mengangkat berbagai atensi pelaku industri fintech sistem pembayaran termasuk mengenai potensi pajak berganda antara SPP-TDLN dan mekanisme pemungutan PPN PMSE. Hingga Juli 2026, terdapat 271 pemungut PMSE terdaftar dengan penerimaan sekitar Rp42 triliun. Isu lain mencakup standarisasi NDA, posisi payment gateway dalam rantai transaksi, status issuer dompet digital, dan linimasa implementasi.

AFTECH, DJP, dan Jalin sepakat perlunya kanal koordinasi bersama, jadwal sprint per anggota, serta kompilasi daftar pertanyaan anggota. Dengan fasilitasi ini, asosiasi membantu memastikan kesiapan teknis anggota dapat dibahas secara lebih terstruktur sebelum implementasi resmi berjalan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Kolaborasi dengan HongKong W3SA-HK Pengembangan Web3 dan Inovasi Keuangan Digital



Perkembangan teknologi Web3, kecerdasan artifisial (AI), tokenisasi, dan Real World Asset (RWA) membuka peluang baru bagi industri keuangan digital. Seiring dengan perkembangan tersebut, penguatan standarisasi dan kolaborasi internasional menjadi semakin penting untuk mendukung kesiapan industri dalam mengadopsi inovasi teknologi secara bertanggung jawab.

Dalam upaya memperkuat konektivitas global, AFTECH mengadakan pertemuan dengan Hong Kong Web3.0 Standardization Association (W3SA-HK) di Hong Kong. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Dewan Etik/Kehormatan AFTECH, Prof. Yudho Giri; Wakil Ketua Umum IV AFTECH, Claudia Kolonas; Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto; serta Direktur Eksekutif AFTECH, Mercy Simorangkir.

Diskusi membahas perkembangan Web3, AI, tokenisasi aset, dan RWA, termasuk pentingnya standarisasi dalam mendukung ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi. Pertemuan ini juga mengidentifikasi sejumlah peluang kerja sama, mulai dari pertukaran pengetahuan mengenai standarisasi Web3, eksplorasi implementasi AI, hingga penguatan kolaborasi antara ekosistem fintech Indonesia dan Hong Kong.

Melalui pertemuan ini, AFTECH terus memperluas kemitraan internasional untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing industri fintech nasional. Kolaborasi dengan W3SA-HK diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dalam bentuk use case yang terkait sektor riil prioritas sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mengikuti dan berkontribusi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital di tingkat global.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bedah Dampak UU P2SK bagi Digital Lending



Perubahan UU P2SK melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 membawa penguatan signifikan terhadap pengawasan lintas sektor. Bagi industri digital lending, substansi teknis layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tidak berubah secara drastis karena POJK 40/2024 tetap menjadi acuan utama. Namun, implikasi kelembagaan, kewenangan pengawasan, dan penegakan hukum perlu dibaca lebih mendalam.

AFTECH menyelenggarakan Expert Lab Bedah UU P2SK sesi Digital Lending pada 26 Agustus 2026. Forum ini diikuti 55 partisipan dan menjadi kelanjutan dari Kick-off Expert Lab yang telah berlangsung sebelumnya. Nucky Pujiardjo, Ketua Departement LPBBTI AFTECH dan Ketua Umum AFTECH LPD dari AFTECH menyampaikan pengantar bahwa sekitar 85 persen anggota telah memahami pokok perubahan UU P2SK, tetapi belum memiliki kajian komprehensif atas dampaknya.

Diskusi menyoroti empat isu prioritas yang perlu dikawal. Pertama, kejelasan kelembagaan dan keanggotaan asosiasi antara LPBBTI dan ITS. Kedua, perluasan kewenangan Satgas Sektor Keuangan yang kini menjangkau entitas berizin. Ketiga, kejelasan batas kewenangan antar lembaga dalam prosedur penyelidikan dan penyidikan. Keempat, penerapan restorative justice dalam penyelesaian temuan kepatuhan.

Perwakilan penyelenggara agregasi dan innovative credit scoring juga mengusulkan diferensiasi regulasi. Entitas penunjang yang mengelola data, tetapi tidak mengelola dana, dinilai tidak seharusnya dibebani standar yang sama ketatnya dengan LPBBTI.

UU P2SK juga membuka ruang bagi produk baru seperti crypto-backed lending, gadai aset kripto, dan tokenisasi piutang. Produk-produk ini memiliki potensi inovasi, tetapi masih membutuhkan kejelasan operasional, perizinan, dan tata kelola.

AFTECH menghimpun masukan sesi ini sebagai bahan penyusunan Roadmap Digital Lending. Pembahasan lanjutan akan diarahkan melalui rangkaian Back to Drawing Board Series agar isu prioritas dapat diterjemahkan menjadi agenda advokasi yang lebih terstruktur.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Bedah Implikasi UU P2SK bagi Digital Insurance



Digital insurance membutuhkan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan inovasi distribusi, perlindungan pemegang polis, dan kesiapan resolusi ketika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Dalam ekosistem digital, data polis, klaim, aset, dan liabilitas tidak selalu berada dalam satu sistem yang sepenuhnya dikelola penanggung, sehingga pembagian tanggung jawab perlu diatur secara lebih jelas.

AFTECH menyelenggarakan Expert Lab Bedah UU P2SK sesi Digital Insurance pada 27 Agustus 2026. Sesi ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Bidang Asuransi Digital AFTECH, J.P. Ellis. Forum ini membahas implikasi UU P2SK terhadap digital insurance, khususnya dalam konteks penjaminan polis, pengelolaan data, dan tanggung jawab hukum dalam ekosistem digital.

Diskusi menyoroti pergeseran program penjaminan polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari mekanisme pasca pencabutan izin usaha menjadi bagian dari kerangka resolusi. Pemicu utama adalah kegagalan penanggung memenuhi kewajiban akibat kesulitan keuangan.

Kesiapan kelembagaan antara OJK, LPS, dan perusahaan asuransi menjadi prioritas utama. Sistem penjaminan tidak dapat berjalan sendiri tanpa penataan kelembagaan yang utuh, termasuk alur data, kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan ketika perusahaan masuk dalam kondisi resolusi.

Kesiapan data polis, klaim, aset, dan liabilitas yang akurat serta portabel menjadi syarat penting. Dalam ekosistem insurtech, sebagian data dapat berada pada mitra teknologi atau kanal distribusi digital, sehingga perjanjian kerja sama perlu memuat klausul kontinuitas dan hak akses.

AFTECH akan mendokumentasikan masukan sesi ini sebagai bahan penyusunan roadmap Klaster Digital Insurance. Kejelasan titik serah kewenangan antara pengawasan OJK dan resolusi oleh LPS menjadi salah satu isu yang perlu dikawal dalam peraturan pelaksana mendatang.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dorong Penguatan Interoperabilitas dan Kepercayaan Digital untuk Mendukung Integrasi Ekosistem Fintech Regional Asia



Perkembangan layanan keuangan digital lintas negara membutuhkan interoperabilitas yang tidak hanya mencakup sistem pembayaran, tetapi juga identitas dan kepercayaan digital. Keberhasilan QRIS di Indonesia menunjukkan pentingnya standar bersama dan konektivitas antarsistem dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital. Pendekatan serupa menjadi semakin relevan untuk mendukung integrasi ekosistem fintech di kawasan Asia.

Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi, berpartisipasi dalam FinTechON 2026 & AFA Summit di Taipei untuk berbagi perspektif mengenai perkembangan industri fintech Indonesia serta peluang memperluas inovasi dari tingkat domestik menuju kolaborasi regional. Forum ini menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai pentingnya interoperabilitas dan penguatan kepercayaan digital dalam membangun ekosistem keuangan yang semakin terhubung.

Dalam forum tersebut, AFTECH menekankan bahwa pengembangan layanan keuangan digital lintas negara tidak cukup hanya menghubungkan sistem pembayaran, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengakuan bersama terhadap identitas dan proses verifikasi digital. Penguatan mutual recognition untuk electronic Know Your Customer (e-KYC) dan tanda tangan elektronik menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi verifikasi, memperkuat keamanan transaksi, serta mendukung penyediaan layanan keuangan digital lintas batas.

Melalui partisipasi dalam FinTechON 2026 & AFA Summit, AFTECH terus mendorong kolaborasi regional dalam pengembangan standar dan infrastruktur kepercayaan digital. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat interoperabilitas layanan, membuka peluang kerja sama lintas negara, serta meningkatkan peran Indonesia dalam membangun ekosistem fintech Asia yang lebih aman, efisien, inklusif, dan terintegrasi.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Sosialisasi Inisiatif Datahub Guna Menjawab Tantangan Infrastruktur Data Pada Industri Fintech



Pemanfaatan data alternatif menjadi salah satu alternatif penting dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur layanan keuangan digital. Kebutuhan kolaborasi data antar pelaku industri dalam kerangka infra ini diikuti dengan tata kelola perlindungan informasi, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang memungkinkan data dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan dan tata kelola.

Sehubungan dengan upaya mengembangkan infrastruktur layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, AFTECH menyelenggarakan Sosialisasi AFTECH Datahub bersama Pengurus Departemen dalam rangka memperkenalkan mekanisme kolaborasi dan pemanfaatan data yang lebih aman dan terstruktur. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anggota untuk memahami konsep, potensi penggunaan, serta manfaat AFTECH Datahub dalam mendukung kebutuhan infrastruktur dan inovasi di industri keuangan digital.

Melalui pendekatan Data Clean Room, AFTECH Datahub dirancang untuk memungkinkan analisis data dalam lingkungan yang terkontrol dan tata kelola yang baik. Format ini berpotensi mendukung berbagai kebutuhan industri, mulai dari data enrichment, penilaian risiko, pengembangan model analitik, hingga deteksi penipuan (fraud detection). Dengan mekanisme tersebut, kolaborasi data dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan keamanan, kerahasiaan informasi, dan kepatuhan regulasi.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju implementasi AFTECH Datahub sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat infrastruktur kolaborasi data di industri fintech Indonesia. Melalui pengembangan inisiatif ini, AFTECH berupaya mendorong pemanfaatan data yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko, serta membangun ekosistem keuangan digital yang semakin kolaboratif, aman, dan berbasis kepercayaan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dorong Peran Fintech sebagai Enabler Sektor Riil bersama Kemenko Perekonomian



Peran fintech dalam ekonomi nasional perlu semakin diarahkan pada sektor riil. Pembiayaan digital, insurtech, aset digital, infrastruktur digital, dan pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai layanan finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas akses, memperkuat produktivitas, dan menjangkau pelaku usaha di luar pusat ekonomi utama.

Dalam audiensi terbatas dengan Bapak Ferry Irawan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 9 September 2026, AFTECH membahas penguatan peran fintech sebagai enabler sektor riil. Delegasi AFTECH terdiri dari Sekretaris Jenderal Firlie Ganinduto dan Direktur Eksekutif Mercy Simorangkir,.

Firlie memperkenalkan piloting pemberdayaan peternak di Malang bersama International Labour Organization sebagai contoh konkret keterlibatan ekosistem fintech dalam sektor riil. Selain itu, AFTECH menyampaikan aspirasi agar Indonesia dapat berkembang sebagai hub aset kripto regional.

AFTECH lebih lanjut memaparkan lanskap industri fintech melalui lima klaster besar, yaitu pembayaran digital, pembiayaan digital, insurtech, aset digital, dan infrastruktur digital. Catatan penting yang diangkat adalah konsentrasi basis konsumen fintech yang masih berada di Pulau Jawa, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih terarah untuk memperluas manfaat layanan digital ke daerah.

Deputi I Kemenko Perekonomian menekankan pentingnya kejelasan positioning dan niche industri, pengawalan pembiayaan hingga tingkat pemerintah daerah, pengembangan asuransi parametrik bagi peternak, serta peluang menghubungkan roadmap fintech dengan agenda Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tindak lanjut diarahkan pada penyusunan positioning paper, pendalaman skema asuransi parametrik peternak, serta proposal keterhubungan Roadmap Ekosistem Fintech 2027 sampai 2032 dengan agenda pembangunan daerah tertinggal.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan Kementerian UMKM Bahas Peran Fintech dalam Kesiapan Pembiayaan Usaha



Akses pembiayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana. Tantangan yang lebih mendasar terletak pada kesiapan usaha, kualitas verifikasi calon nasabah, kapasitas pencatatan, dan kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan formal. Fintech dapat mengambil peran pada titik ini melalui data, credit scoring, dan kanal pembiayaan alternatif.

AFTECH melakukan audiensi terbatas dengan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, pada 10 September 2026. Pembahasan diikuti oleh Direktur Eksekutif AFTECH, Mercy Simorangkir.

Mercy menekankan bahwa persoalan utama pembiayaan UMKM bukan semata ketersediaan dana, tetapi kapabilitas dan bankability UMKM. Securities crowdfunding dan P2P lending disebut sebagai kanal alternatif yang dapat memperluas akses pembiayaan, dengan pembelajaran dari India dalam pengembangan infrastruktur data kredit.

Kementerian UMKM memaparkan kerangka Program Kesra dengan tiga pilar, yaitu peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan pembiayaan. Program ini menyasar kelompok masyarakat desil 4, dengan inisiatif seperti basis data Sapa UMKM, piloting pergeseran agunan dari barang ke kekayaan intelektual, model perusahaan agregator, Komite Pembiayaan, restrukturisasi KUR 0 persen untuk daerah pascabencana, serta Kredit Perempuan Pra Sejahtera.

Piloting direncanakan menyasar enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Dalam konteks Bulan Fintech Nasional 2026, keterlibatan sektor riil dan UMKM menjadi salah satu prioritas penting.

AFTECH akan mendukung kolaborasi peningkatan literasi keuangan digital, kesiapan pembiayaan, mendorong pengembangan credit scoring alternatif melalui inisiatif Sapa UMKM.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Gelar Strategic Dialogue 2026 Bersama Regulator & Kementrian: Perkuat Kontribusi Keuangan Digital terhadap Produktivitas Sektor Riil



Perkembangan industri fintech Indonesia perlu diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap produktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekosistem keuangan digital membutuhkan sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi lintas sektor agar layanan keuangan dapat menjawab kebutuhan dunia usaha secara lebih efektif.

Pada 29 September 2026, AFTECH menyelenggarakan Strategic Dialogue 2026 bersama regulator dan perwakilan kementerian/lembaga untuk membahas arah pengembangan industri keuangan digital Indonesia. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyelaraskan prioritas industri, pemerintah, dan regulator dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital yang lebih produktif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan sektor riil.

Diskusi berfokus pada lima bidang utama, yaitu pembiayaan digital, asuransi, pembayaran, investasi dan aset digital, serta infrastruktur digital. Pengembangan kelima bidang tersebut memerlukan dukungan sistem data yang terintegrasi, keselarasan regulasi, penguatan kemitraan lintas sektor, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Berbagai aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing industri sekaligus memperluas manfaat inovasi keuangan digital bagi pelaku usaha.

Melalui Strategic Dialogue 2026, AFTECH menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara industri, regulator, dan pemerintah dalam merumuskan arah pengembangan ekosistem keuangan digital nasional. Dialog ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kebijakan dan inisiatif industri yang mampu meningkatkan akses pembiayaan, efisiensi layanan, serta produktivitas sektor riil, sehingga fintech dapat memberikan kontribusi yang semakin nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Tekankan Pentingnya Identitas Digital dan Sertifikat Elektronik dalam Membangun Kepercayaan Ekosistem Fintech Asia



Pesatnya perkembangan industri fintech di Asia mendorong kebutuhan akan ekosistem keuangan digital yang semakin aman, terpercaya, dan terintegrasi. Penguatan identitas digital (digital identity) dan pemanfaatan sertifikat elektronik menjadi aspek penting dalam mendukung keamanan transaksi, perlindungan data, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Pada 28 Juli 2026, Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi, menjadi narasumber dalam Asia Tech Summit Manila 2026 untuk berbagi perspektif mengenai upaya Indonesia membangun ekosistem digital yang aman dan inovatif. Forum ini menjadi kesempatan bagi AFTECH untuk menyampaikan pentingnya penguatan kepercayaan digital sebagai fondasi perkembangan industri fintech di kawasan Asia.

Dalam forum tersebut, AFTECH menekankan peran identitas digital dan sertifikat elektronik dalam mendukung proses verifikasi identitas serta persetujuan penggunaan data (consent) yang lebih aman dan terverifikasi. Pemanfaatan teknologi ini juga memberikan dasar pembuktian yang lebih kuat dalam transaksi digital, sehingga dapat meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengembangkan layanan keuangan digital.

Melalui partisipasi dalam forum internasional ini, AFTECH menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem fintech Asia yang semakin terhubung. Penguatan infrastruktur kepercayaan digital diharapkan dapat mendukung interoperabilitas layanan, meningkatkan perlindungan pengguna, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun ekonomi digital kawasan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Perkuat Literasi Keuangan Digital bagi Mahasiswa UID Bali Campus



Perluasan akses terhadap layanan keuangan digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi, terutama bagi generasi muda. Mahasiswa semakin akrab dengan pembayaran digital, e-commerce, aplikasi keuangan, dan berbagai penawaran produk finansial melalui kanal daring. Di sisi lain, kemudahan akses tersebut juga menuntut pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, keamanan data, biaya layanan, serta kemampuan membedakan layanan legal dan ilegal.

AFTECH berkolaborasi dengan Fintopia Easycash dan United in Diversity Bali Campus dalam kegiatan literasi keuangan bertajuk *Adulting 101, How to Spending Smart and Manage Wisely* pada 2 Juli 2026. Mewakili AFTECH, Direktur Eksekutif AFTECH, Mercy Simorangkir, menyampaikan sambutan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, perwakilan OJK Provinsi Bali, President United in Diversity Foundation, Tantowi Yahya, serta jajaran komisaris Easycash.

Dalam kegiatan tersebut, AFTECH menegaskan bahwa literasi keuangan bagi mahasiswa tidak diarahkan untuk mendorong penggunaan pinjaman, melainkan untuk memperkuat kemampuan mengambil keputusan finansial secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya paparan iklan pinjaman daring, termasuk pinjaman ilegal, yang mudah menjangkau kelompok usia muda melalui media sosial dan platform digital.

AFTECH juga memperkenalkan perannya sebagai asosiasi payung industri fintech nasional yang sejak 2019 ditunjuk OJK sebagai asosiasi penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Dengan lebih dari 200 anggota, AFTECH berperan dalam menjembatani edukasi publik, kebutuhan industri, dan perlindungan konsumen di ekosistem fintech.

Data Annual Members Survey AFTECH menunjukkan bahwa pengguna fintech masih didominasi oleh kelompok usia 26 sampai 35 tahun dan masih terkonsentrasi di Jabodetabek. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari fintech belum sepenuhnya tersebar merata, termasuk di wilayah di luar pusat ekonomi utama. Oleh karena itu, literasi di lingkungan kampus menjadi salah satu kanal penting untuk memperluas pemahaman generasi muda tentang layanan keuangan digital.

AFTECH turut memperkenalkan Indonesia Fintech Youth Community atau INFINITY sebagai kanal keterlibatan bagi generasi muda. Melalui inisiatif tersebut, literasi keuangan digital diharapkan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami manfaat, risiko, dan peluang fintech secara lebih kritis.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Hadiri Peluncuran Bronyx AI, Soroti Kesiapan Keamanan Siber Berbasis AI



Keamanan siber menjadi kebutuhan utama dalam industri keuangan digital. Ketika serangan siber semakin otomatis dan kompleks, pelaku industri perlu memiliki kemampuan deteksi, pengujian, dan respons yang lebih cepat. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam keamanan siber mulai menjadi salah satu pendekatan penting untuk memperkuat perlindungan data dan transaksi.

AFTECH menghadiri peluncuran Bronyx AI oleh ITSEC Asia pada 15 Juli 2026. AFTECH diwakili oleh Anggota Dewan Etik AFTECH, Prof. Yudho Giri Sucahyo. Forum ini juga membahas perkembangan AI, tantangan keamanan siber, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri.

Bronyx AI diperkenalkan sebagai platform pengujian penetrasi otomatis berbantuan AI buatan Indonesia. Platform ini dirancang untuk menyelesaikan pengujian keamanan dalam hitungan jam, dengan temuan berisiko tinggi dan kritis yang tetap divalidasi oleh konsultan keamanan siber sebelum laporan akhir disampaikan.

Kehadiran teknologi berbasis AI dalam pengujian keamanan menunjukkan perubahan pendekatan industri dari pemeriksaan manual menuju proses yang lebih cepat dan terotomatisasi. Namun, validasi manusia tetap diperlukan agar hasil pengujian dapat dibaca dengan tepat dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Ikuti Australia Indonesia Technology Roundtable untuk Perkuat Dialog Ekonomi Digital



Kerja sama teknologi antara Indonesia dan mitra internasional semakin penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital. Bagi industri fintech, dialog lintas negara dapat membuka ruang kolaborasi dalam bidang investasi, pengembangan kompetensi, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi untuk layanan keuangan.

AFTECH menghadiri Australia Indonesia Technology Roundtable pada 15 Juli 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Assistant Minister for Foreign Affairs and Trade Australia, Matt Thistlethwaite, dan menjadi bagian dari kunjungan tiga hari beliau ke Indonesia. Forum ini menyoroti kerja sama ekonomi yang berlandaskan Comprehensive Economic Partnership.

Diskusi meja bundar menjadi jalur dialog langsung antara industri teknologi keuangan Indonesia dan pemerintah Australia. Dalam konteks hubungan ekonomi kedua negara, sektor digital menjadi salah satu area yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk memperkuat konektivitas bisnis, kemampuan teknologi, serta kolaborasi antarpelaku industri.

Bagi fintech, kerja sama internasional dapat mendukung peningkatan standar keamanan siber, pemahaman praktik regulasi lintas negara, serta membuka peluang kemitraan dengan penyedia teknologi dan investor. Agenda ini juga relevan dengan kebutuhan anggota AFTECH untuk memperluas jejaring dan mengikuti perkembangan ekonomi digital di tingkat kawasan.

Lebih lanjut bagi AFTECH, partisipasi dalam dialog ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring internasional asosiasi. Ruang dialog seperti ini dapat mendukung penguatan kerja sama yang lebih konkret bagi anggota, terutama dalam bidang ekonomi digital, kompetensi, dan keamanan siber.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dorong Literasi Keuangan Digital yang Lebih Relevan bagi Generasi Muda



Kemudahan transaksi digital perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran digital, layanan fintech, dan investasi berbasis aplikasi, generasi muda menghadapi tantangan baru seperti konsumsi impulsif, FOMO investing, ketiadaan dana darurat, dan penggunaan pinjaman yang dapat memengaruhi rekam jejak kredit.

AFTECH menjadi narasumber dalam webinar Digital Money, Smart Living, Bijak Bertransaksi di Era Keuangan Digital yang diselenggarakan OJK pada 10 Agustus 2026. Turut hadir mewakili AFTECH Wakil Sekretaris Jenderal AFTECH, Chrisma Albandjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program OJK Peduli Cerdas Keuangan dan diikuti peserta dari pelaku usaha jasa keuangan, mahasiswa, akademisi, kementerian, pemerintah daerah, asosiasi, dan komunitas.

Dalam pemaparannya, Chrisma menekankan bahwa digitalisasi keuangan merupakan keniscayaan. Indonesia memiliki 235,26 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi. Pada triwulan II 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 16,7 miliar transaksi dengan pertumbuhan hampir 37 persen secara tahunan, sementara nilai transaksi QRIS telah melampaui Rp1.420 triliun.

Di sisi lain, generasi Z sebagai digital native tetap menghadapi tantangan literasi. Sekitar 62 persen pendapatan berpotensi habis untuk gaya hidup. Tawaran investasi dengan imbal hasil tidak wajar, absennya dana darurat, dan over-borrowing juga menjadi isu yang perlu diantisipasi.

AFTECH turut menjelaskan keragaman ekosistem fintech, mulai dari payment, digital lending, digital asset, innovative credit scoring, earned wage access, wealth technology, hingga insurtech. Masyarakat juga diingatkan untuk memverifikasi legalitas platform melalui kanal resmi OJK maupun laman cekfintech.id.

Pesan utama forum ini adalah bahwa uang digital hanya alat. Keputusan kecil yang diambil secara sadar setiap hari tetap menjadi penentu utama kesehatan keuangan. Edukasi seperti ini menjadi penting agar akses terhadap layanan digital tidak berujung pada perilaku konsumtif atau risiko penggunaan platform ilegal.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Jajaki Peluang Kolaborasi dengan IARFC untuk Penguatan Kapasitas dan Konektivitas Industri Keuangan



Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi lintas industri menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekosistem fintech Indonesia. Konektivitas antara pelaku fintech dan profesional keuangan juga membuka peluang untuk meningkatkan kompetensi serta memperluas kerja sama di sektor jasa keuangan.

Pada 18 Agustus 2026, AFTECH mengadakan pertemuan dengan Alan C. Kifer, Chair of the Board of Trustees, International Association of Registered Financial Consultants (IARFC), untuk membahas potensi kolaborasi antara kedua organisasi.

Pada 18 Agustus 2026, AFTECH menerima dan beraudiensi dengan Alan C. Kifer, Chair of the Board of Trustees, International Association of Registered Financial Consultants (IARFC), serta President & Chairman IARFC Indonesia, Aidil Akbar Madjid dan jajaran pengurus untuk membahas potensi kolaborasi antara kedua organisasi

Pertemuan ini mengeksplorasi sejumlah peluang kerja sama, khususnya dalam pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta penguatan konektivitas antara ekosistem fintech dan jaringan profesional keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap wawasan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan digital yang terus berkembang.

Melalui pertemuan ini, AFTECH melanjutkan upaya memperluas jejaring kemitraan strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi anggota. Penjajakan kerja sama dengan IARFC juga menjadi bagian dari komitmen AFTECH dalam mendorong penguatan kompetensi, kolaborasi, dan pengembangan ekosistem fintech Indonesia yang semakin terhubung.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Perkuat Konektivitas Global dan Peluang Kolaborasi Industri Fintech Indonesia melalui Intersekt 2026



Perkembangan ekosistem fintech Indonesia yang semakin matang membuka peluang kolaborasi dengan pelaku industri teknologi dan keuangan global. Namun, memasuki pasar Indonesia tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi, kebutuhan industri, serta karakteristik ekosistem keuangan digital nasional. Kolaborasi yang relevan menjadi faktor penting dalam menghadirkan solusi yang mampu memperkuat kapabilitas dan mendukung pertumbuhan industri fintech Indonesia.

AFTECH berpartisipasi dalam Intersekt 2026 di Melbourne, Australia, melalui Direktur Eksekutif AFTECH, Mercy Simorangkir, yang berbagi perspektif mengenai perkembangan ekosistem fintech Indonesia serta peluang bagi pelaku industri global untuk membangun kemitraan dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Forum ini menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi pasar Indonesia sekaligus memperkuat hubungan antara ekosistem fintech nasional dan internasional.

Dalam forum tersebut, AFTECH mengidentifikasi sejumlah peluang kolaborasi strategis, khususnya pada bidang digital trust, electronic Know Your Customer (e-KYC), Regulatory Technology (RegTech), kecerdasan artifisial (AI), pembayaran lintas batas, serta infrastruktur kredit dan manajemen risiko. AFTECH juga menekankan bahwa peluang bagi perusahaan teknologi global tidak selalu terletak pada upaya mendisrupsi layanan yang sudah ada, tetapi juga pada penyediaan teknologi dan kapabilitas yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan keuangan digital di Indonesia.

Melalui partisipasi dalam Intersekt 2026, AFTECH terus mendorong penguatan konektivitas internasional sebagai bagian dari pengembangan ekosistem fintech nasional. Pertukaran pengetahuan, kolaborasi teknologi, dan kemitraan lintas negara diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih konkret, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital Indonesia yang semakin inovatif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dukung Penjurian Akhir PIDI Digdaya x Hackathon 2026

**PUSAT INOVASI
DIGITAL INDONESIA**
DIGDAYA X HACKATHON

**BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL**



Inovasi digital membutuhkan jembatan antara ide, validasi teknis, dan kebutuhan industri. Kompetisi seperti PIDI Digdaya x Hackathon 2026 menjadi penting karena tidak hanya menyeleksi solusi teknologi, tetapi juga menguji potensi implementasi, dampak, serta kesiapan untuk berkolaborasi dengan pelaku ekosistem.

AFTECH memenuhi undangan Bank Indonesia sebagai Dewan Juri pada penjurian tahap akhir PIDI Digdaya x Hackathon 2026 yang berlangsung pada 22 sampai 23 September 2026. Peran juri dijalankan oleh Ketua Departemen AI AFTECH, Entin Rostini, untuk Kategori Mahasiswa dan Kategori Profesional. PIDI diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama OJK, ASPI, AFTECH, APUVINDO, dan LPPI.

Dari 2.094 proposal yang diterima, proses seleksi bertahap menghasilkan 20 tim finalis, terdiri atas 10 tim Kategori Mahasiswa dan 10 tim Kategori Profesional. Sembilan tim di antaranya berfokus pada penguatan ketahanan dan inovasi keuangan. Sekitar 95 persen finalis berada pada tahap prototipe atau proof of concept, menunjukkan bahwa sebagian besar solusi sudah melampaui tahap ide awal.

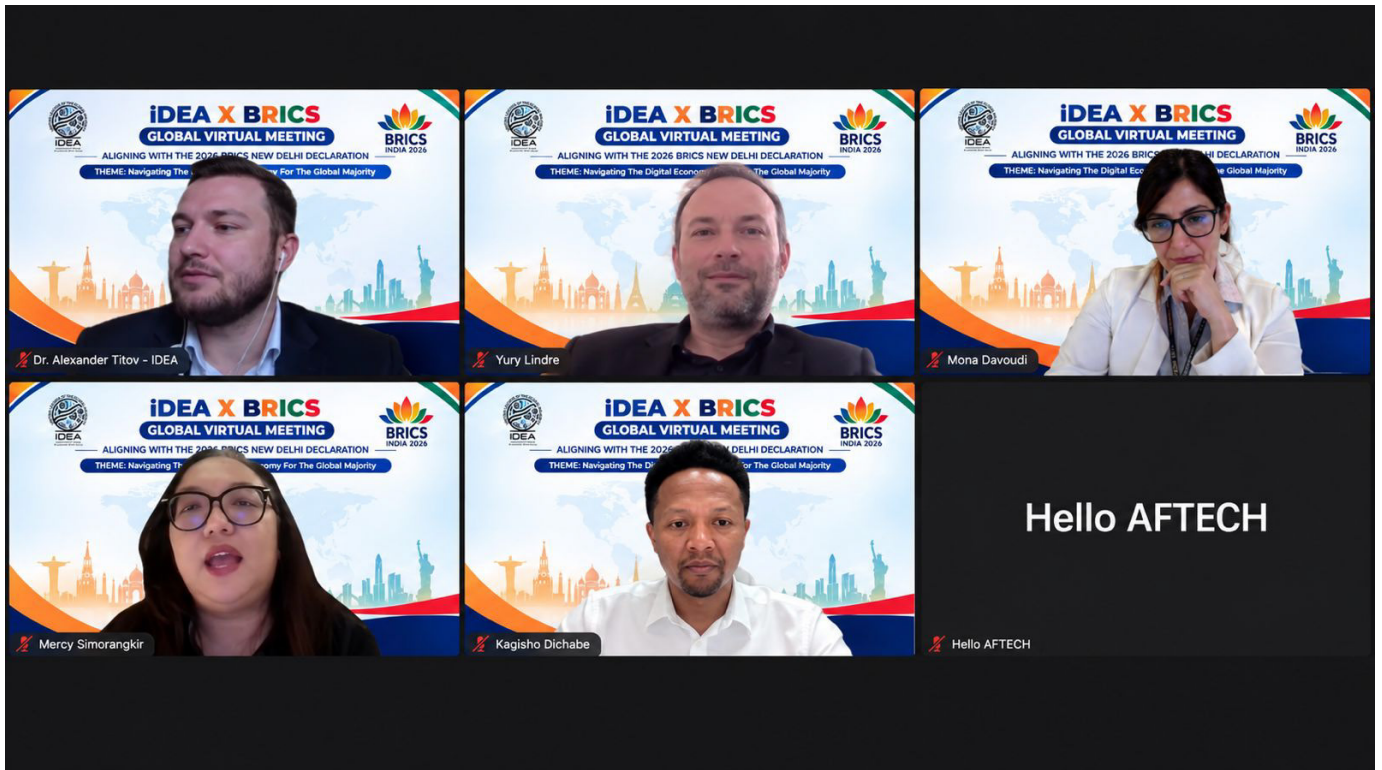
Tahap business matching juga mencatat 49 offtaker yang berminat pada 40 tim. Data ini menunjukkan adanya minat industri untuk melihat inovasi yang lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Dalam proses penjurian, peserta dinilai menggunakan tujuh kriteria, dengan bobot terbesar pada presentasi, kualitas teknis prototype, serta efektivitas dan dampak.

Keterlibatan AFTECH memperkuat masuknya perspektif industri fintech dalam menilai kelayakan inovasi. Konsentrasi finalis pada manajemen risiko, keuangan syariah, investor ritel, dan elektronifikasi keuangan daerah membuka peluang bagi anggota untuk membaca potensi kolaborasi, mentoring, maupun offtake teknologi.

Tindak lanjut diarahkan pada pemetaan finalis yang relevan dengan kebutuhan anggota, terutama pada bidang manajemen risiko dan fraud, keuangan syariah, investor ritel, serta inklusi UMKM. Hasil penjurian diumumkan dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Bawa Perspektif Fintech Indonesia dalam Forum iDEA x BRICS



Transformasi ekonomi digital di negara berkembang membutuhkan kerja sama lintas kawasan. Isu pembayaran lintas negara, Digital Public Infrastructure, pembiayaan UMKM, pencegahan fraud, dan tata kelola AI semakin menjadi agenda bersama di antara negara-negara Global Majority.

AFTECH memenuhi undangan International Digital Economies Association sebagai pembicara dalam sesi tingkat tinggi iDEA x BRICS pada 24 September 2026. Direktur Eksekutif AFTECH, Mercy Simorangkir, hadir dalam forum yang mempertemukan pimpinan bank sentral, regulator, pelopor fintech, dan para pakar kebijakan perdagangan.

Pembahasan mencakup lima fokus utama. Pertama, pembayaran lintas negara dan penyelesaian dalam mata uang lokal melalui mandat BRICS Payment Task Force. Kedua, Digital Public Infrastructure dan layanan digital. Ketiga, pembiayaan perdagangan dan akses modal UMKM melalui Jaipur Consensus on Invoice Discounting Mechanisms.

Dua fokus lainnya adalah keamanan keuangan digital dan pencegahan fraud lintas negara, serta tata kelola AI dan teknologi frontier. Kelima isu tersebut beririsan langsung dengan agenda industri fintech Indonesia, terutama perluasan QRIS Antarnegara, kesiapan anggota yang telah beroperasi di luar negeri, pertukaran informasi fraud bersama IASC, pembiayaan UMKM, serta tata kelola AI.

Keterlibatan AFTECH dalam forum multilateral ini membuka jejaring kebijakan dan bisnis di luar kawasan ASEAN. Ruang seperti ini penting untuk membawa pengalaman Indonesia sekaligus membaca praktik negara berkembang lain dalam membangun infrastruktur keuangan digital yang inklusif dan aman.

Kegiatan Pengurus

C Level Dinner Perkuat Ruang Dialog antara Ketua Umum dan Pimpinan Anggota AFTECH



Komunikasi antara asosiasi dan pimpinan anggota menjadi penting ketika industri fintech memasuki fase yang lebih matang. Dalam situasi ketika sebagian pelaku besar mulai mencatat profit, agenda industri perlu bergerak dari narasi pertumbuhan cepat menuju pembahasan yang lebih strategis mengenai profitabilitas, konsolidasi, regulasi, dan kontribusi terhadap ekonomi digital.

AFTECH menyelenggarakan C-Level Dinner perdana bersama Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, pada 14 Agustus 2026. Forum ini dirancang sebagai ruang komunikasi yang akan diselenggarakan rutin sehingga bisa meningkatkan komunikasi seluruh anggota dengan Ketua Umum AFTECH dan pengurus AFTECH. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, dilanjutkan keynote remarks dari Pandu Sjahrir.

Forum perdana ini diikuti perwakilan pimpinan lebih dari 20 perusahaan anggota lintas kluster, antara lain Easycash, AdaKami, TSI, SMDV, AlForesee, Indodana, DANA, SeaBank, Xendit, Advance AI, Privy, Mandiri, Komunal, Amarta, CLIK, Telkomsel, PERURI, Espay, Sijitu, Telkom Indonesia, GoPay, dan Indodax.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum AFTECH menilai kondisi industri fintech saat ini lebih sehat dibandingkan satu hingga dua tahun sebelumnya. Sejumlah pemain besar, termasuk GoTo dan Grab, telah mencatatkan profit dan tidak lagi membutuhkan pendanaan tambahan. Capaian ini dinilai perlu dikomunikasikan secara agregat untuk memperkuat narasi industri, termasuk dalam agenda Bulan Fintech Nasional Festival.

Forum juga membahas Roadmap Industri Fintech 5 tahun ke depan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh kluster anggota, dan ditargetkan diluncurkan pada penutupan BFN Fest 2026, penunjukan AFTECH LPD (Layanan Pendanaan Digital) oleh OJK serta beberapa isu strategis industri.

C-Level Dinner akan diselenggarakan secara reguler dan diharapkan menjadi kanal penting untuk menangkap aspirasi strategis anggota secara lebih mendalam. Dengan format yang lebih terfokus, forum ini dapat membantu asosiasi merumuskan agenda advokasi, komunikasi publik, dan pengembangan industri yang lebih selaras dengan kebutuhan pimpinan anggota.



Liputan Khusus

IDBS 2026 Tegaskan Fintech sebagai Mitra Strategis Perbankan dan Enabler Sektor Riil

Transformasi keuangan digital memasuki fase baru ketika batas antara perbankan, fintech, sistem pembayaran, dan aset keuangan digital semakin terhubung dalam satu ekosistem. Perubahan ini menandai era financial convergence, di mana layanan keuangan tidak lagi berkembang dalam jalur yang terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan sektor riil.

Semangat tersebut menjadi benang merah Indonesia Digital Bank Summit 2026 yang diselenggarakan AFTECH pada 7 Juli 2026 dengan tema Beyond Banking, Redesigning Finance for Wellbeing and Growth in the Real Economy. Forum ini mempertemukan regulator, perbankan, fintech, pelaku sektor riil, akademisi, penyedia teknologi, investor, serta mitra internasional untuk membahas arah sistem keuangan digital yang lebih inklusif, resilien, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa fintech kini bukan lagi alternatif bagi perbankan, melainkan mitra strategis dalam membangun sistem keuangan masa depan. Menurut Pandu, IDBS 2026 menjadi momentum bagi AFTECH untuk menegaskan kesiapan fintech naik kelas, memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan regulator, serta memastikan inovasi keuangan digital memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor riil.

1 Kolaborasi Bank dan Fintech di Era Universal Banking



IDBS 2026 menempatkan universal banking, Open Finance, pemanfaatan Artificial Intelligence, Digital Public Infrastructure, dan Digital Financial Infrastructure sebagai bagian penting dari arah transformasi sektor keuangan. Melalui forum ini, AFTECH mendorong sejumlah agenda prioritas, mulai dari penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, pengembangan konsep financial wellbeing, kesiapan implementasi universal banking dan Open Finance, hingga perluasan kolaborasi pembiayaan sektor riil dan UMKM.

Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa fintech tetap menjadi penggerak inovasi yang melengkapi layanan perbankan melalui teknologi, data, dan jangkauan ke segmen yang belum sepenuhnya terlayani. Dalam era universal banking dan beyond banking, fintech dan perbankan perlu ditempatkan sebagai mitra yang saling melengkapi, dengan output forum yang mencerminkan kepentingan kolektif anggota serta menjadi masukan konstruktif bagi regulator.

Arah tersebut juga tercermin dalam paparan OJK mengenai era Bank 5.0, perluasan kegiatan usaha bank secara bertahap melalui amandemen UU P2SK menuju universal banking, serta pentingnya level playing field sebagai prasyarat bagi pengembangan ekosistem keuangan yang sehat. OJK juga menyoroti proyeksi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 200 miliar hingga USD 360 miliar pada 2030.

Dari sisi transformasi digital nasional, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menyampaikan perkembangan pilot unique digital ID di Banyuwangi yang akan diperluas ke 40 kabupaten. Kepemilikan rekening juga meningkat dari 52 persen menjadi 80,5 persen, sementara ASEAN Digital Economic Framework ditargetkan untuk ditandatangani pada November 2026. Agenda ini menunjukkan bahwa identitas digital, inklusi keuangan, dan kerja sama kawasan menjadi fondasi penting bagi ekonomi digital Indonesia.

2 Data Industri sebagai Dasar Agenda Kebijakan



Salah satu agenda utama IDBS 2026 adalah peluncuran Annual Member Survey 2025-2026 oleh Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto. Survei yang diikuti oleh 141 anggota ini memberikan gambaran mengenai fase pertumbuhan industri fintech yang semakin matang. Temuan survei menunjukkan 43 persen anggota telah menjadi profitabel, 84 persen telah mengadopsi atau menguji AI, dan 86 persen menilai regulasi saat ini mendukung inovasi.

Temuan tersebut memperkuat pesan bahwa fintech Indonesia tidak lagi hanya berada pada fase ekspansi awal. Industri mulai memasuki tahap yang lebih matang, dengan perhatian yang lebih besar pada keberlanjutan bisnis, tata kelola teknologi, kolaborasi dengan perbankan, serta kontribusi terhadap perekonomian riil. Dalam konteks ini, data AMS menjadi dasar penting bagi AFTECH dalam menyusun agenda advokasi dan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.

Rangkaian panel IDBS membahas 4 pilar utama, yaitu Beyond Banking, Financial Wellbeing, Inclusive Growth, dan Digital Infrastructure. Isu yang mengemuka mencakup digital trust, financial wellbeing, pertumbuhan inklusif, alternative credit scoring, kesiapan infrastruktur, dan keamanan siber. Dari AFTECH, sejumlah pengurus menjadi narasumber, antara lain Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi, Ketua Departemen PKA AFTECH, Christian Limawan, Wakil Ketua Umum VII AFTECH, Haryati Lawidjaja, serta Anggota Dewan Etik AFTECH, Dr. Pratama Persadha.

Ketua Dewan Etik AFTECH, Harun Reksodiputro, menekankan bahwa integrasi fintech dan perbankan harus diiringi dengan penguatan tata kelola industri, mulai dari manajemen risiko, keamanan siber, perlindungan konsumen, tata kelola data, hingga kesiapan menghadapi risiko baru seperti AI. Menurut Harun, tata kelola yang kuat bukan penghambat inovasi, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, AFTECH akan merangkum hasil diskusi dari empat pilar utama IDBS 2026 ke dalam policy brief, rekomendasi kebijakan, serta agenda koordinasi bersama regulator, industri perbankan, dan pemangku kepentingan terkait. Forum yang dihadiri lebih dari 350 profesional senior ini menjadi pijakan bagi AFTECH untuk memperkuat peran fintech sebagai enabler sektor riil, mitra strategis perbankan, serta bagian penting dari sistem keuangan digital Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3 **Jakarta Bank dan Fintech Connect 2026 Dorong Kemitraan Bank dan Fintech**



Kemitraan antara bank dan fintech semakin dibutuhkan dalam ekosistem keuangan digital. Perbankan memiliki skala, basis nasabah, dan tingkat kepercayaan yang kuat, sementara fintech membawa teknologi, data, dan kemampuan menjangkau segmen pengguna yang lebih beragam. Keduanya memiliki ruang kolaborasi yang semakin besar, terutama dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, terintegrasi, dan relevan bagi kebutuhan konsumen.

AFTECH menyelenggarakan Jakarta Bank and Fintech Connect 2026 pada 7 Juli 2026 sebagai forum jejaring yang mempertemukan pelaku perbankan dan fintech. Sambutan AFTECH disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar, forum ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Etik AFTECH, Prof. Yudho Giri Sucahyo.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari diskusi Indonesia Digital Bank Summit 2026 yang diselenggarakan pada hari yang sama. Jika IDBS memberikan ruang pembahasan strategis mengenai arah industri, Jakarta Bank and Fintech Connect menghadirkan ruang interaksi yang lebih langsung bagi pelaku bank dan fintech untuk membangun hubungan serta menjajaki peluang kemitraan.

Daftar partisipan mencatat sekitar 106 entri dari bank umum nasional, bank pembangunan daerah, Bank Indonesia, PERBANAS, penyedia teknologi, perusahaan telekomunikasi, Austrade, dan pelaku fintech. Kehadiran bank pembangunan daerah juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat daerah, terutama untuk mendukung pembiayaan dan layanan digital yang lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi lokal.

Relevansi forum ini diperkuat oleh temuan Annual Member Survey AFTECH yang menunjukkan 62 persen anggota menempatkan bank sebagai mitra utama. Data tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dengan perbankan bukan lagi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pengembangan bisnis fintech.

Bagi AFTECH, forum jejaring seperti ini memperkuat peran asosiasi sebagai penghubung antara anggota, perbankan, dan mitra ekosistem. Tindak lanjut diarahkan pada fasilitasi pertemuan lanjutan antaranggota dan bank yang memiliki minat kemitraan.



Liputan Khusus

FEKDI x IFSE 2026 Perkuat Sinergi Inovasi, Talenta, dan Kepercayaan Digital

Ekonomi keuangan digital Indonesia memasuki fase yang semakin terhubung antara inovasi, talenta, infrastruktur pembayaran, dan tata kelola. Pertumbuhan transaksi yang tinggi perlu diikuti oleh kemampuan industri untuk menjaga kepercayaan, memperluas manfaat bagi UMKM, serta memastikan inovasi dapat diterjemahkan menjadi produktivitas.

AFTECH berpartisipasi sebagai salah satu asosiasi co-host FEKDI x IFSE 2026 pada 24 sampai 26 September 2026 bersama Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ASPI dan APUVINDO. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30.000 peserta luring dan daring, dengan lebih dari 30 sesi seminar dan talk show.

Pada hari pertama, pembukaan menegaskan pentingnya sinergi kebijakan, inovasi, dan talenta. Transaksi ekonomi keuangan digital pada Agustus 2026 mencapai 6,11 miliar transaksi, tumbuh 40,36 persen secara tahunan. Ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai US\$ 340 miliar pada 2030.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa kepercayaan merupakan aset utama dalam industri keuangan digital. Pola serangan kini tidak hanya menargetkan sistem, tetapi juga manusia. Indonesia Anti Scam Centre telah menerima lebih dari 668 ribu laporan sejak November 2024 dan memblokir dana korban sebesar Rp771,2 miliar. Pesan utama yang dibawa adalah pentingnya tindakan cepat, yaitu memblokir dan melaporkan terlebih dahulu.



Anggota Dewan Pengawas AFTECH sekaligus Group CEO VIDA, Niki Santo Luhur, menyampaikan bahwa inovasi digital baru bermakna ketika dapat meningkatkan produktivitas. Berdasarkan Annual Members Survey 2025 sampai 2026, 84 persen anggota telah menggunakan atau menguji coba AI dan 86 persen menilai kerangka regulasi mendukung inovasi. Tantangan kemudian bergeser pada konsistensi implementasi, terutama terkait perizinan dan pelaporan kepatuhan.

Pada hari ketiga, perluasan QRIS Antarnegara dari enam menjadi delapan negara, dengan Timor-Leste dan Hong Kong, membuka ruang baru bagi konektivitas pembayaran lintas negara. Wakil Ketua Umum II AFTECH, Junedy Liu, menekankan tiga kata kunci, yaitu connectivity, trust, dan growth. Peran fintech menjadi penting untuk membawa konektivitas pembayaran hingga ke pengguna dan UMKM, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen, keamanan, dan good governance.

Partisipasi dalam FEKDI x IFSE memosisikan AFTECH sebagai penyelenggara sekaligus sebagai suara industri yang melengkapi perspektif otoritas. Agenda talenta PIDI membuka peluang bagi anggota sebagai mitra uji coba dan calon offtaker, sementara perluasan QRIS Antarnegara relevan bagi anggota yang melayani UMKM dan konsumen lintas negara. Isu perizinan, konsistensi implementasi, dan tata kelola AI tetap menjadi agenda advokasi yang perlu dilanjutkan bersama regulator.



Liputan Khusus

Back to the Drawing Board Series, AFTECH Rumuskan Arah Industri Fintech Menuju 2032

Perubahan kerangka regulasi dan perkembangan teknologi keuangan mendorong industri fintech Indonesia untuk meninjau kembali arah pertumbuhannya. Penguatan pengawasan melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), perkembangan regulasi di sektor keuangan, teknologi & fintech, serta meningkatnya adopsi kecerdasan artificial membawa implikasi terhadap model bisnis, tata kelola, dan daya saing industri. Kondisi ini menuntut penyusunan strategi yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi perkembangan ekosistem keuangan digital dalam beberapa tahun ke depan.

Menanggapi perubahan tersebut, AFTECH menyelenggarakan Back to the Drawing Board Series (BTDB) sebagai rangkaian forum konsultasi bersama anggota lintas klaster dalam rangka menyusun AFTECH Industry Roadmap 2027-2032. Rangkaian ini merupakan tahap kedua dari empat tahapan penyusunan roadmap, yang dirancang untuk menghasilkan 15 roadmap model bisnis sebelum seluruhnya diharmonisasikan menjadi satu dokumen strategis industri.

Pendekatan Back to the Drawing Board berangkat dari kebutuhan untuk meninjau kembali dasar pengembangan setiap model bisnis. Alih-alih hanya memproyeksikan pertumbuhan berdasarkan kondisi operasional saat ini, anggota diajak untuk mengevaluasi siapa yang dilayani, nilai ekonomi yang dihasilkan, hambatan yang dihadapi, serta arah pengembangan yang ingin dicapai pada 2032.

Rangkaian pembahasan diawali dengan oleh Expert Lab Bedah UU P2SK pada Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai tentang berbagai model bisnis sepanjang September. Tahap awal tersebut menghasilkan Regulatory Implication Matrix yang memetakan dampak perubahan regulasi terhadap perizinan, pengawasan, kepatuhan, dan operasional industri. Temuan ini kemudian digunakan sebagai landasan diskusi dalam Back to the Drawing Board Series untuk memastikan aspirasi yang dirumuskan memiliki dasar hukum sekaligus relevan dengan kondisi aktual pelaku usaha.

Berbeda dari seminar atau diskusi panel pada umumnya, BTDB dirancang sebagai forum kerja yang partisipatif. Anggota terlibat langsung dalam mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi efektivitas model bisnis, serta menentukan prioritas pengembangan. Pendekatan ini memastikan roadmap tidak hanya disusun berdasarkan perspektif regulator atau konsultan, tetapi juga mencerminkan pengalaman dan kebutuhan industri yang akan menjalankannya.

1 Dari Perubahan Regulasi Menuju Roadmap Industri



Penyusunan roadmap diawali dengan pendalaman implikasi UU P2SK terhadap model bisnis fintech. Dalam Expert Lab Digital Lending yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2026, sebanyak 55 peserta membahas perubahan kelembagaan, kewenangan pengawasan, serta kebutuhan penyesuaian kepatuhan. Nuki Pujiardjo dari AFTECH menyampaikan bahwa sekitar 85 persen anggota telah memahami pokok-pokok perubahan UU P2SK, tetapi belum memiliki kajian komprehensif mengenai dampaknya terhadap kegiatan usaha.

Diskusi mengidentifikasi empat prioritas utama, yaitu kejelasan kelembagaan LPBBTI dan ITSK, perluasan kewenangan Satgas Sektor Keuangan, batasan kewenangan antarlembaga dalam proses penegakan hukum, serta penerapan restorative justice. Peserta juga menekankan perlunya diferensiasi regulasi antara perusahaan yang mengelola dana dan penyedia layanan penunjang berbasis data, seperti agregator dan penyedia inovasi dalam penilaian kredit.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing model bisnis. Hasil Expert Lab kemudian menjadi salah satu landasan untuk memperdalam agenda advokasi dan pengembangan industri melalui Back to the Drawing Board Series.

Dalam tahap kedua, AFTECH menyelenggarakan 15 sesi diskusi yang mencakup berbagai model bisnis, mulai dari pembayaran digital, LPBBTI, Buy Now Pay Later, Earned Wage Access, pemeringkat kredit alternatif, penyelenggara agregasi jasa keuangan, asuransi digital, investasi daring, aset kripto, hingga layanan pendukung seperti Digital ID dan e-KYC, Digital Trust, AI, blockchain dan tokenisasi, financial planner, serta penyedia jasa aplikasi perpajakan.

Untuk memastikan pembahasan dapat dibandingkan antarklaster, setiap sesi menggunakan lima kerangka diskusi utama, yaitu Consumer Behaviour/Needs, Regulatory, Benchmarking (Global Experience), Business Case, dan Roadmapping.

Pembahasan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan segmen pasar yang belum terlayani, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi regulasi, pembelajaran dari yurisdiksi lain, serta pengujian kelayakan komersial berdasarkan pengalaman pelaku industri. Hasil keempat pembahasan tersebut menjadi dasar penyusunan visi dan inisiatif strategis untuk masing-masing model bisnis hingga tahun 2032.

Melalui pendekatan ini, roadmap tidak hanya memuat aspirasi perubahan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan model pendapatan, struktur kemitraan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan talenta dan teknologi. Setiap prioritas dirumuskan secara bertahap untuk periode 2027–2028, 2029–2030, dan 2031–2032, disertai pembagian tanggung jawab serta indikator kemajuan.

2 Digital Identity dan AI Menjadi Prioritas Pengembangan



Penguatan infrastruktur identitas digital menjadi salah satu isu strategis dalam Back to the Drawing Board Series. Melalui FGD klaster Digital ID dan e-KYC pada 9 September 2026, AFTECH mempertemukan 30 peserta dari tujuh institusi, termasuk Tilaka, Digisign, VIDA, dan PERURI. Diskusi dibuka oleh Deputy Director of Strategic Program and Policy Advocacy AFTECH, Teddy Firmansyach Supardi.

Peserta menyoroti kebutuhan akan kerangka identitas digital nasional yang mampu memperjelas hubungan antara Digital ID yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital milik Dukcapil. Pengembangan Single Sign-On dan e-KYC yang dapat digunakan kembali juga diusulkan untuk meningkatkan efisiensi verifikasi pengguna, mengurangi pengulangan proses identifikasi, serta memperkuat interoperabilitas, sambil tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Temuan tersebut memperlihatkan salah satu persoalan lintas model bisnis yang ingin dijawab melalui BTDB, yaitu kebutuhan akan infrastruktur digital bersama. Identitas digital yang terintegrasi tidak hanya relevan bagi penyelenggara layanan verifikasi, tetapi juga dapat mendukung efisiensi proses pengenalan nasabah pada berbagai layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan asuransi digital.

Sehari kemudian, pembahasan berlanjut ke klaster Artificial Intelligence dengan melibatkan Dyna.ai, Fineksi, PT ETD, BlockchainWorks, Trustmetric, dan BPS. Forum ini mengidentifikasi perkembangan penggunaan AI untuk analisis kredit, document intelligence, layanan berbasis suara, dan riset pasar, sekaligus memetakan kebutuhan industri akan infrastruktur komputasi, talenta digital, keamanan data, serta kejelasan regulasi.

Dalam kerangka penyusunan roadmap, diskusi AI juga diarahkan untuk mengevaluasi kelayakan bisnis dan kesiapan dalam mengadopsi teknologi. Penilaian mencakup perubahan model pendapatan, kebutuhan investasi infrastruktur, kapasitas organisasi, serta prasyarat tata kelola yang diperlukan agar pemanfaatan AI dapat berkembang secara bertanggung jawab.

Pembahasan kedua klaster menunjukkan bahwa penguatan teknologi perlu disertai dengan kerangka kebijakan yang mendukung kepastian usaha dan kepercayaan pengguna. Identitas digital yang interoperabel serta pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kemampuan industri dalam mengelola risiko.

Seluruh rangkaian BTDB menerapkan prinsip Chatham House Rule untuk memungkinkan pertukaran pandangan secara terbuka tanpa atribusi kepada individu maupun institusi tertentu. Masukan peserta didokumentasikan melalui BTDB Canvas, sementara perbedaan pandangan tetap dicatat sebagai bagian dari proses penyusunan prioritas. Mekanisme ini memberikan ruang bagi perusahaan dengan berbagai skala usaha untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan masing-masing.



Setiap sesi ditargetkan menghasilkan catatan diskusi, BTDB Canvas yang telah divalidasi, kerangka awal roadmap, serta daftar isu regulasi prioritas. Seluruh keluaran dari 15 sesi kemudian dikonsolidasikan dalam BTDB Synthesis Report untuk mengidentifikasi isu lintas model bisnis, termasuk interoperabilitas, tata kelola data, kebutuhan infrastruktur bersama, dan pemanfaatan AI.

Hasil konsolidasi tersebut akan menjadi masukan bagi tahap berikutnya dalam penyusunan AFTECH Strategic Roadmap 2027–2032, khususnya untuk merumuskan visi industri, prioritas kebijakan, dan inisiatif pengembangan yang lebih terukur. Proses ini sekaligus menjadi dasar untuk membangun keselarasan antara kebutuhan pelaku usaha, arah kebijakan regulator, dan kontribusi keuangan digital terhadap produktivitas sektor riil.

Melalui Back to the Drawing Board Series, AFTECH memperkuat peran asosiasi sebagai penghubung antara aspirasi anggota dan arah kebijakan nasional. Roadmap yang dihasilkan diharapkan bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi rujukan bersama bagi industri, regulator, dan mitra ekosistem dalam membangun sektor fintech yang lebih kompetitif, terpercaya, dan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan hingga 2032.



Revisi UU P2SK untuk Siapa?

Setiap kali ada revisi undang-undang di sektor keuangan, narasinya nyaris selalu sama: penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan, penyempurnaan tata kelola. Media memberitakannya sebagai kemenangan bagi regulator. Pengamat membedah pasal demi pasal dengan bahasa hukum yang teknis.

Namun ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab secara jujur: untuk siapa sebenarnya semua ini? Ketika DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 4 Juni 2026 dan mengundangkannya sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 pada 17 Juni 2026, sebagian besar sorotan tertuju pada penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Revisi ini mengubah 73 pasal, menyisipkan 42 pasal baru, mencabut 9 pasal, dan menyentuh 124 ketentuan di 10 undang-undang sekaligus. Namun di tengah hiruk-pikuk pembahasan kelembagaan itu, nyaris tidak ada yang bertanya dengan lantang: apa untungnya bagi nasabah yang setiap hari mempertaruhkan uangnya di pasar perdagangan derivatif?

Pertanyaan ini bukan basa-basi retorik. Sepanjang 2025, nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK), salah satu instrumen utama perdagangan derivatif di Indonesia mencapai Rp48.867 triliun, melonjak 49,8 persen secara tahunan, dengan volume transaksi 14,56 juta lot atau naik 12 persen dibanding 2024. Jumlah nasabah aktif pun terus bertambah per Juli 2025 saja tercatat 125.000 nasabah aktif, naik 13,3 persen hanya dalam sebulan dibanding Juni 2025. Di balik angka pertumbuhan yang mengesankan itu, ada ratusan ribu orang biasa mulai dari karyawan, pengusaha kecil, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga yang menaruh uang mereka di instrumen derivatif, sering kali tanpa benar-benar memahami apa yang mereka hadapi. Merekalah pihak yang paling berkepentingan menjawab pertanyaan: revisi ini untuk siapa?

Nasabah perdagangan derivatif di Indonesia bukan orang baru mendengar janji "perlindungan investor yang lebih kuat". Sejak Bappebti beralih penuh tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan serta aset kripto kepada OJK dan BI pada Januari 2025, sebuah proses yang disebut sebagai tonggak penting reformasi sektor keuangan. Narasi serupa sudah berulang kali disampaikan ke publik. Faktanya, keluhan lama yang selama ini menghantui industri tetap ada: promosi yang menjanjikan keuntungan instan tanpa disertai peringatan risiko yang memadai, materi edukasi yang minim sebelum nasabah menyetor dana, dan proses pengaduan yang berbelit ketika transaksi bermasalah atau dana nasabah tersangkut di pialang bermasalah.

Nasabah yang sudah lelah mendengar janji-janji semacam ini punya hak untuk skeptis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal niat baik regulator karena niat baik itu sudah berkali-kali dinyatakan, melainkan apakah UU 4/2026 benar-benar mengubah pengalaman nasabah di lapangan, atau sekadar mengganti nama dan struktur kelembagaan tanpa menyentuh akar masalah yang dikeluhkan konsumen selama bertahun-tahun.

Revisi dan Dampaknya bagi Nasabah

Ada tiga perubahan dalam UU 4/2026 yang, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya menyentuh langsung kepentingan konsumen perdagangan derivatif, meski jarang dibingkai dengan cara itu oleh pemberitaan arus utama.

Pertama, kewenangan penyidikan OJK kini ditegaskan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berkoordinasi dengan penyidik Polri, sebuah penyesuaian yang merespons putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi nasabah yang selama ini kesulitan menembus proses hukum ketika menjadi korban. Kasus yang sayangnya bukan hal langka di industri ini, perubahan ini seharusnya berarti jalur pengaduan yang lebih jelas dan proses hukum yang tidak menggantung tanpa kepastian. Namun klausul di atas kertas tidak otomatis berarti nasabah akan merasakan proses yang lebih cepat. Kejelasan prosedural baru akan teruji ketika kasus pertama pasca-revisi ini benar-benar bergulir dan diselesaikan hingga tuntas.

Kedua, perluasan mandat OJK ke bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 membuka instrumen derivatif baru bagi publik. Bagi nasabah, ini secara teori berarti pilihan yang lebih luas untuk berinvestasi dan melakukan lindung nilai. Tapi ini juga membawa risiko baru yang belum tentu dipahami oleh mayoritas investor ritel yang saat ini saja masih berjuang memahami mekanisme leverage pada kontrak derivatif konvensional seperti emas dan forex. Instrumen baru tanpa literasi yang memadai sama saja dengan membuka pintu lebih lebar bagi kerugian yang lebih besar.

Ketiga, dan ini yang paling relevan bagi konsumen meski paling jarang disorot: hasil evaluasi kinerja DPR terhadap BI, OJK, dan LPS kini bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti, bukan sekadar laporan tahunan yang berhenti di meja komisi. Ini adalah satu-satunya perubahan dalam UU 4/2026 yang benar-benar memberi nasabah "senjata" tidak langsung yakni tekanan politik yang bisa memaksa regulator memperbaiki kinerja pengawasan, alih-alih membiarkan keluhan publik menguap tanpa konsekuensi struktural seperti yang sering terjadi selama ini.

Pertumbuhan Pasar Versus Literasi Keuangan

Ironi terbesar industri perdagangan derivatif Indonesia adalah pertumbuhan transaksi yang melesat 49,8 persen dalam setahun tidak diimbangi laju yang sama dalam literasi keuangan nasabahnya. Banyak nasabah baru masuk ke pasar derivatif karena tergiur testimoni di media sosial, iklan yang menjanjikan cuan cepat, atau ajakan dari kenalan yang mengklaim sudah "berhasil", bukan karena benar-benar memahami mekanisme margin call, leverage, atau risiko likuidasi paksa ketika pasar bergerak berlawanan arah dari posisi mereka.

UU 4/2026 menegaskan bahwa materi edukasi dan promosi produk derivatif harus jelas, transparan, dan berimbang antara potensi keuntungan dan risiko. Ini poin yang secara normatif patut diapresiasi. Tapi penegasan di atas kertas ini hanya benar-benar bermakna bagi nasabah jika regulator secara konsisten menindak pialang yang masih menjual mimpi keuntungan instan di lapangan, bukan sekadar mencatatnya sebagai pelanggaran administratif yang berujung teguran ringan. Selama sanksi terasa lebih ringan dibanding keuntungan yang bisa diraup dari praktik pemasaran menyesatkan, pialang nakal tidak akan punya insentif kuat untuk berubah.

Konsolidasi Kelembagaan Membingungkan Nasabah

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, pembagian peran yang lebih tegas antara Bappebti, OJK, dan BI mungkin terasa sebagai penataan yang lebih rapi dan efisien. Bappebti kini fokus pada instrumen derivatif tradisional seperti forex dan komoditi fisik, OJK menangani aset kripto, derivatif keuangan, bursa karbon, hingga bursa mineral dan komoditas strategis yang baru, sementara BI menjaga stabilitas transaksi valuta asing.

Namun bagi nasabah awam yang tidak mengikuti detail regulasi, sistem tiga lembaga dengan kewenangan yang terus bergeser dan tumpang tindih secara historis justru berpotensi membingungkan: ke mana harus mengadu jika bertransaksi forex, ke mana jika soal aset kripto, dan ke mana jika soal bursa mineral yang baru akan hadir 2027. Selama kanal pengaduan tidak disederhanakan menjadi satu pintu yang jelas dan dikomunikasikan secara masif ke publik, kompleksitas kelembagaan ini justru bisa menjadi celah baru yang dimanfaatkan pialang nakal untuk saling lempar tanggung jawab antarlembaga ketika nasabah mengeluh.

UU 4/2026 memang memberi OJK dan BI perangkat hukum yang lebih tajam dibanding UU P2SK sebelumnya: kewenangan yang lebih luas, jalur penyidikan yang lebih jelas, dan akuntabilitas yang lebih mengikat ke DPR. Tapi jawaban atas pertanyaan "revisi ini untuk siapa" tidak akan ditentukan oleh pasal-pasal yang ditulis dengan rapi di lembaran negara, melainkan oleh apakah nasabah biasa benar-benar merasakan bedanya dalam pengalaman sehari-hari mereka: apakah pengaduan direspons lebih cepat dan tidak berbelit, apakah pialang nakal benar-benar ditindak tegas dan bukan sekadar diberi teguran administratif, dan apakah edukasi risiko benar-benar sampai ke tangan calon nasabah sebelum uang disetor, bukan sesudah mereka mengalami kerugian dan baru menyadari risiko yang sebenarnya sudah tertulis di halaman terakhir dokumen yang tak pernah dibaca.

Selama proses hukum bagi korban pialang nakal masih berbelit dan memakan waktu bertahun-tahun, selama promosi yang menyesatkan masih beredar bebas di media sosial tanpa penindakan yang konsisten, dan selama nasabah masih kebingungan harus mengadu ke lembaga mana ketika masalah muncul, maka revisi ini baru menjadi undang-undang untuk regulator dan sebuah kemenangan administratif dan kelembagaan bukan untuk konsumen yang menginvestasikan uangnya setiap hari di pasar perdagangan derivatif. Pertumbuhan transaksi senilai Rp48.867 triliun hanya akan menjadi angka yang benar-benar membanggakan jika di baliknya ada perlindungan nyata yang dirasakan langsung oleh nasabah, bukan sekadar kelembagaan yang tampak lebih kuat dan tertata rapi di atas kertas peraturan.



BULAN FINTECH NASIONAL 2026

11 NOVEMBER - 12 DECEMBER 2026



100+
PROMOTIONAL
DEALS FROM
FINTECH COMPANIES



15+
MAJOR EVENT
SERIES BFN 2026



INFINITY
GOES TO CAMPUS
PROGRAM



**BULAN FINTECH
NASIONAL FESTIVAL
2026**



INDONESIA
DIGITAL FINANCE
FORWARD 2027-2032



200+
JOB OPPORTUNITIES
ON THE BFN
WEBSITE



QUIZ
INTERACTIVE AND
GIVEAWAY



BFN Fest 2026: International Conference,
Workshops, Expo, Business Matching
26-27 November - Balai Kartini



BFN FEST
CONFERENCE



BFN FEST
EXPO



DIGITAL X REAL
SECTOR WORKSHOP



INFINITY
STAGE



FINTECH
EXPERIENCE



CONNECTION
LOUNGE



JAKARTA FINTECH
CONNECT

For Further Information,
Visit Our Official Website

www.bulanfintechnasional.com

LET'S BUILD CONNECTIONS TOGETHER!

Scan the QR Code and connect with us!



www.fintech.id



[fintechid](https://www.fintechid)



[fintech.id](https://www.fintechid)



[Asosiasi Fintech Indonesia](https://www.asosiasi-fintech-indonesia.org)

THE INDONESIAN FINTECH ASSOCIATION MEMBERSHIP

Indonesia Fintech Association (AFTECH) is an association that represents over 300 digital financial services institutions in Indonesia. We're the largest and the first fintech association in the country, established in 2016. As of right now, our members represent over 25 digital finance business models in the country. In 2019 AFTECH was officially appointed by the Indonesia Financial Services Authority as the Association for Digital Financial Innovation. That means the association is also a partner for OJK in developing a healthy digital finance ecosystem in Indonesia that supports the creation of financial inclusion.

AFTECH Members by Cluster Members

Payment System	Financial Services Aggregator	Innovative Credit Scoring	Crypto Asset	P2P Lending	Futures Brokers	Property Tokenization
50	22	11	10	9	1	1
Financial Planner	Banking	Capital Market	Insurance & Insurtech	Business Consultant	Tax Application	International Companies
5	6	4	9	2	3	4
Digital Identity	Earned Wage Acces	Buy Now Pay Later	Gold Digital	Tech Partners	E-Commerce	Others
5	8	4	2	25	2	25

Benefits of AFTECH Membership

-  Access to regulations & the latest industry updates
-  Take part in forums, training sessions and exclusive events
-  Consultation & direct advocacy with regulators
-  Join a wide range of AFTECH communities
-  Expand your network with other fintech players
-  Corporate branding exposure through the media and events
-  Media coverage + regular publications from AFTECH

AFTECH Membership Categories

- Members Permanent**
Permanent Members are fintech companies that are registered with and/or hold official licences from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), or other relevant regulatory authorities (including those operating within a regulatory sandbox)
- Honorary Member**
Honorary Members are non-fintech companies, such as banks and other financial institutions, whose business activities are closely linked to the fintech industry
- Member Observer**
Monitoring Members are financial technology companies which do not yet hold, but will register and/or apply for, an official licence from the JK, BI or other relevant official authorities, and which have rights and obligations under these Articles of Association
- Members Supporters**
Supporting Members are international entities whose business activities or mission are closely linked to the financial technology industry, both in Indonesia and globally, and which have rights and obligations under these Articles of Association
- Member Extraordinary**
Associate Members is a membership category within AFTECH specifically for associations within Indonesia's digital economy and finance ecosystem that share a common mission and vision to promote responsible digital financial innovation and foster inclusive economic growth.



Membership Registration:

Register via the QR code shown here or via the link, <https://www.fintech.id/id/register/form>

Address:

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman No.86, Kota Jakarta Pusat, 10220

Join us to support financial inclusion by increasing access, use, and quality of financial services.

For more information, please contact:

Abynprima Rizki (Director of External Engagement and Membership)
Email: abyn.rizki@fintech.id
Rafaa Karimah (Community Development & Compliance Associate)
Email: rafaa.karimah@fintech.id



Asosiasi Fintech Indonesia

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence,
Jl. Jenderal Sudirman No.86 2nd floor,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

 www.fintech.id

 [fintech.id](https://www.tiktok.com/fintech.id)

   [fintechid](https://www.facebook.com/fintechid)

 [Asosiasi Fintech Indonesia](https://www.youtube.com/AsosiasiFintechIndonesia)

